

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID-19 untuk pertama kalinya. Menurut Our World in Data, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6.040.000.000, dan sebanyak 156.000 jiwa telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Kasus ini tercatat di 34 provinsi di Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 ini cukup serius terutama pada sektor kesehatan, perekonomian, dan sosial di Indonesia. Secara global, pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Data dari BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa dalam tiga bulan pertama tahun tersebut, perekonomian Indonesia mengalami perlambatan sebesar 1,01% dibandingkan dengan tiga bulan terakhir tahun 2019. (Chairani dkk., 2020). Kondisi ini merupakan hasil langsung dari penghentian kegiatan ekonomi akibat penerapan aturan physical distancing atau sosial distancing sebagai protokol kesehatan untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Penerapan kebijakan pemerintah mengenai physical distancing atau sosial distancing mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi di Indonesia. Menurut (Sutrisna, 2020) sektor jasa Pendidikan mengalami perlambatan ekonomi tertinggi dengan angka -10,39%, diikuti oleh sektor administrasi pemerintah dengan angka -8,54%. Dampak perlambatan ekonomi ini berujung pada PHK atau pemberhentian sementara tenaga kontrak atau honorer. (Chairani 2020). Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Menurut data dari BPS (2020), jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 6.880.000 atau 4,99% pada bulan Februari 2020. (Chairani dkk., 2020). Menurut data BPS Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 6,26% (BPS 2021).

Tingkat pengangguran tersebut dapat berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan di Indonesia, jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27.550.000.000 jiwa, meningkat 1.130.000.000 jiwa dibandingkan dengan Maret 2020 dan meningkat sebanyak 2.760.000.000 jiwa dibandingkan dengan September

2019 (BPS 2020). Pemerintah terus berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan, terutama selama pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia akibat pembatasan kegiatan ekonomi yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibiayai oleh Dana Desa (BLT-DD), sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang penentuan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2022.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) merupakan program bantuan pemerintah desa berupa pemberian uang tunai. Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 bulan terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember sebesar Rp. 300.000,- setiap bulannya. Bantuan langsung tunai dana desa diharapkan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Fitriyanto selaku sekretaris desa, bantuan langsung tunai dana desa pada desa olean memilih sasaran utama yaitu keluarga miskin terutama lansia yang tidak bekerja maupun yang sudah janda, selain itu keluarga miskin yang masih belum pernah menerima bantuan ganda atau belum pernah menerima bantuan apapun dan juga keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata dan sesuai kriteria yang dimiliki desa. Pengelolaan data pemilihan warga yang berhak menerima bantuan umumnya masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan adanya kesalahan. Masalah yang dihadapi masyarakat adalah banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya, misalnya ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan namun tidak mendapatkannya, atau sebaliknya, ada yang menerima bantuan meskipun sebenarnya tidak berhak. Akibatnya, masyarakat yang merasa kurang terlayani dan berhak menerima bantuan seringkali mengunjungi kepala desa untuk meminta keadilan.

Dalam mengatasi isu masalah tersebut, diperlukan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan untuk menentukan warga yang berhak

mendapatkan program bantuan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Konsep dasar dari metode ini adalah melakukan penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada setiap atribut. Metode Simple Additive Weighting (SAW) dipilih karena dapat menentukan nilai bobot pada setiap atribut yang telah ditentukan, sehingga dapat menghasilkan perankingan terhadap penerima bantuan. Sistem ini akan diimplementasikan di Kantor Kepala Desa.

Peneliti memilih metode Simple Additive Weighting (SAW) karena metode SAW ini lebih unggul jika menggunakan data yang banyak dibandingkan dengan menggunakan metode AHP menurut (Qiyamullaili dkk, 2020). Penggunaan metode SAW juga memiliki pengujian sensitifitas yang paling optimal dibandingkan TOPSIS menurut (fatkhurrochman dkk, 2018). Menurut (Anindita, 2020) metode SAW ini juga memiliki waktu eksekusi lebih cepat dari pada metode profile matching.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas dan peristiwa yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan (SPK) dalam penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat penting agar program bantuan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan sesuai sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merancang aplikasi sistem pendukung keputusan penerima bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode SAW ?

2. Bagaimana cara menerapkan metode *simple additive weighting* (SAW) pada penentuan penerima bantuan langsung tunai dana desa di desa olean kecamatan situbondo berbasis website ?
3. Bagaimana tingkat akurasi sistem pendukung keputusan penerima bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode SAW ?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan yang diharapkan dari perancangan aplikasi ini adalah :

1. Merancang aplikasi sistem pendukung keputusan penerima bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode SAW.
2. Menerapkan metode SAW pada penentuan penerima bantuan langsung tunai dana desa di desa olean kecamatan situbondo.
3. Mengetahui tingkat akurasi sistem pendukung keputusan penerima bantuan langsung tunai dana desa menggunakan metode SAW.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi pemerintahan desa  
Dapat mempermudah pemerintah desa dalam proses seleksi penerima bantuan lebih efisien dan membantu pemerintah desa dalam pembagian bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran.
2. Manfaat bagi masyarakat desa  
Mendapat keadilan dalam pemerataan pembagian bantuan langsung tunai.